

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Radar Solo
Media Online

Wilayah: Kabupaten Sragen

Halaman 4

Inspektorat Temukan 55 Kasus

Mayoritas Proyek Fisik Bermasalah

SRAGEN, Radar Solo - Inspektorat Kabupaten Sragen mengeluarkan rekomendasi 55 temuan penyimpangan dari tujuh desa di Kabupaten Sragen. Hal tersebut terungkap dalam gelar pengawasan daerah (Larwasda) Sragen, kemarin (13/11).

Inspektur Kabupaten Sragen Wahyu Widayat menyampaikan, temuan di desa lebih banyak pada hasil proyek fisik. Seperti kekurangan volume suatu pekerjaan dari seharusnya. Pemeriksaan dari inspektorat juga me-

mastikan kekurangan itu segera dilengkapi.

"Kita juga cek fisik, jadi *rekoso tenanan* teman-teman yang di lapangan. Kita juga minta yang mengerjakan *oyo kebangeten*," ujar Wahyu usai penutupan acara.

Dia menyampaikan pengawasan juga dilakukan masyarakat. Inspektorat menjaga agar mereka tidak keluar jalur. Sejauh ini temuan karena tidak menaati standar operasional prosedur (SOP). Lantas pelaksanaan proyek diminta menyelesaikan dalam waktu 60 hari kerja. Terutama yang berkaitan dengan keuangan.

"Jika tidak, saya tidak bertanggung jawab lagi pada efek sam-

pingnya. Lewat dari itu teman-teman aparat penegak hukum berwenang mengambil alih," tegasnya.

Dia menyebutkan sudah ada perjanjian kerja sama dengan aparat penegak hukum terkait permasalahan dan temuan. Baik kepolisian dan kejaksaan negeri, saling tukar-menukar dokumen.

"Jika penegak hukum mendapati bukti-bukti awal, bisa meminta data laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari kami," terangnya.

Lantas jika kurang dari 60 hari, masih diberikan kesempatan pada aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk menyelesaikan masalah. Jika

segera ada kesempatan dikembalikan ke negara, sudah mengurangi satu di antara tiga unsur korupsi. Yakni tidak ada kerugian negara.

Pihaknya mengaku tidak mudah dalam pengawasan desa. Dari 196 desa di Sragen, hanya ada 31 personel untuk pengawasan. Idealnya butuh 45 pengawas. "Kita cari cara agar tiap tahun bisa ketemu semua desa. Karena memang kesulitan mengawasi semua," tuturnya.

Sementara dari data yang dihimpun, temuan inspektorat pada 2018 mencapai 599 kasus. Sejumlah 361 di antaranya merupakan temuan administrasi.

Sementara 238 merupakan temuan finansial senilai Rp 2.782.429.146,61 yang berpotensi merugikan negara.

Sebagai tindak lanjut, inspektorat mengeluarkan 621 rekomendasi. Rekomendasi ini terinci menjadi beberapa kategori. Baik bersifat finansial, penegakan aturan, peningkatan efektivitas, maupun rekomendasi hukuman ringan.

Dari temuan finansial, yang sudah berhasil ditindaklanjuti dan dikembalikan ke asal anggaran sebesar Rp 2.038.687.489,61. Sementara yang belum berhasil ditindaklanjuti Rp 743.741.657,00.

(din/adi)